

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- AM, Sardiman dan Amurwani Dwi Lestariningsih, *Sejarah Indonesia*. Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang Kemendikbud, Jakarta, 2017.
- Brownlie, Ian, *Principles of Public International Law*, Oxford University Press, Oxford, 2008.
- Buana, Mirza Satria, *Hukum Internasional Teori dan Praktik*, Nusamedia, Bandung, 2007.
- CF. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern, Kajian Tentang Sejarah Dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, Penerjemah SPA Teamwork, Editor Derta Sri Wdowatie dan Waluyati Handayani, Nuansa Media, Bandung, 2004.
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Djalal, Hasjim, *Negara Kepulauan Menuju Negara Maritim*, Lembaga Laut Indonesia, Jakarta, 2010.
- Djatmiati, Tatiek Sri, *Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2004.
- Hamilton, Dony L, *Overview of Conservation in Archaeology: Basic Conservation Procedures*, A & M University, Texas, 2000.
- Isjwara, Fred, *Pengantar Ilmu Politik*, Bina Cipta, Bandung, 1996.
- Kartodirdjo, Sartono, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 Dari Emporium Sampai Imperium I*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.
- Kusumaatmadja, Mochtar & Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Alumni, Bandung, 2003.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Hukum Laut*, Binacipta, Jakarta, 1978.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Penelitian Hukum*, Kencana Media Group, Jakarta, 2011.
- Mauna, Boer, *Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2001.
- Muckelroy, Keith, *Maritime Archaeology*, Cambridge, London, 1978.
- O'Connell, D.P., *International Law, Second Edition, Vol. Two*, Steven and Sons, London, 1970.

- Parthiana, I Wayan, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Prijanto, Heru, *Hukum Laut Internasional*, Banyumedia Publishing, Malang, 2007.
- Ricklefs, M. M. C., *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2010.
- Siregar, Doli. D., *Management Aset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Sodik, Didik Mohammad, *Hukum Laut Internasional*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UIP, Jakarta, 2004.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1980.
- Stephani Moles, Commander, RAN, *The Laws of The Sea Convention 1982 and the Refugee Convention 1951: How They Impact on Extant Australian Government Policy Concerning Illegal Imigration, Department of Defence of the Australian Government*, Canberra, Australia, 2003.
- Sumardiman, Adi, *Seri Hukum Internasional: Wilayah Indonesia Dan Dasar Hukumnya (buku 1)*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1992.
- Suryokusumo, Sumaryo, *Hukum Organisasi Internasional*, UI-Press, Jakarta, 1990.
- Sundari Rangkuti, Siti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Edisis Ketiga, Airlangga University Press, Surabaya, 2005.
- Starke, JG, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Strate, Anastasia. 1995. *The Protection of The Underwater Cultural Heritage: An Emerging Objective of the Contemporary Law of the Sea*. Martinus Nijhoff Publishers, London.
- Tasrif, S, *Hukum Internasional Tentang Pengakuan Dalam Teori Dan Praktik*, CV. Abardin, Bandung, 1987.
- Utrecht, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1983.
- Wallace, Rabbecca M.M. *Hukum internasional terjemahan Bambang Arumanandi*, Sweet and Maxwell, London, 1986.
- Winarwati, Indien, *Konsep Negara Kepulauan*. Setara Press, Malang, 2016.

**Peraturan-peraturan:**

*UNESCO Convention On The Protection of Underwater Cultural Heritage* Tahun 2001;

*Convention Concerning The Protection Of The World Cultural And Natural Heritage* Tahun 1972;

*International Council On Monuments And Sites (ICOMOS): Charter On The Protection And Management Of Underwater Cultural Heritage* Tahun 1996;

*UNESCO Convention Law on Protection of Cultural Heritage* Tahun 2001 Tentang Warisan Budaya Dunia Dan Cagar Budaya;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya;

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea*;

Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam;

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam (PANNAS BMKT);

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Pembagian Hasil Pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam Antara Pemerintah Dan Perusahaan;

### Sumber-sumber lain :

- Batubara, Asyhadi Mufsi, “*Pelindungan Cagar Budaya Bawah Air dalam Kajian Analisis Hukum*”, Prodi Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo Kendari, Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur, Volume 8, Nomor 1, Juni 2014.
- D. K. Abbass, A Marine Archaeologist Looks at Treasure Salvage, 30 J.MAR. L. & COM.261, 261 (1999). Abbass, *an archaeologist himself, raises the issue of the different standards employed by salvors and archaeologists. “What non-archaeologists may see as overly fastidious, we see as a commitment to the public benefits of good science.” Id. at 262. Among other complaints raised by archaeologists, there are concerns that salvors’ needs to quickly maximize profits lead to sacrifices in scientific methodology and that the study of artifacts cannot continue once they have been sold to private collections. Id. at 263.*
- Handayani, Yeni. “*Indonesia Negara Kepulauan Dan Konvensi Hukum Laut 1982*”, Jurnal Rechtsvinding, ISSN 2089-9009: Media Pembinaan Hukum Nasional, 31 Desember 2014.
- Helmi, Surya. “*Potensi Peninggalan Arkeologi Bawah Air di Perairan Pulau Sumatera*”. Edisi 13/Tahun XV/Juni 2009.
- Helmi, Surya. 2010. *Warisan Budaya Di Dasar Laut, Data Arkeologi Yang Dilupakan*. Presentasi pada Seminar Semarak Arkeologi 2010. Bandung. Direktorat Peninggalan Bawah Air. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia; Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta, 1998, hal 867. Juga: Webster’s New Twentieth Century Dictionary Of The English Language Unabridged, Second Edition, a Webster 1s New World Dictionary, Published by Prentice Hall Press, New York, NY 10023, Page 1734.
- Mundardjito. *Paradigma dalam Arkeologi Maritim 1*. Wacana Vol. 9 Nomor 1. April 2007 (1—20).
- Nagaoka, Manasori, *Konvensi UNESCO Tahun 2001 Perlindungan Warisan Budaya Bawah Air*, disajikan dalam Seminar dan Pameran Warisan Bawah Air, UNESCO, di Auditorium Gedung Baru museum Nasional di Jakarta, 4 Agustus 2010.
- Pudjiastuti, Lilik dan Franky Butar-Butar. *Izin Pengangkatan Benda Berharga Atas Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) Sebagai Instrumen Konservasi Sumber Daya Laut Di Indonesia*, Jurnal Yuridika: Volume 25 No 2, Mei-Agustus 2010.

- Ridwan Lasabuda, *Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia*, Vol. I-2, Januari 2013. *Sejarah Hukum Internasional*. Dalam situs <http://www.negarahukum.com/hukum/sejarah-hukum-internasional.html>, diakses pada 6 Desember 2017.
- Rosmawati, Pengaruh Hukum Internasional terhadap Hukum Nasional, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Nomor 61, Th. XV (Desember, 2013).
- Sesaria Mochtar, Agni. *In-Situ Preservation Sebagai Strategi Pengelolaan Peninggalan Arkeologi Bawah Air Indonesia*, Kalpataru, *Majalah Arkeologi* Vol. 25 Nomor 1, Mei 2016 (53-64).
- Sofian, Harry Octavianus. *Permasalahan Arkeologi Bawah Air Di Indonesia*. *Jurnal Kapata Arkeologi, Jurnal Arkeologi Wilayah Maluku Dan Maluku Utara Balai Arkeologi Ambon* Vol. 6 No, 11, November 2010.
- Sutiyarti, Ruri. 2005. *Mempertanyakan Efektivitas Kebijakan Panitia Nasional (Pannas) Dalam Menanggulangi Penjarahan Harta Karun Bawah Air Di Indonesia*. *Artefak* Edisi XXVII/September 2005, Yogyakarta, Himpunan Mahasiswa Arkeologi (HIMA) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada.
- Surya Helmi. “*Potensi Peninggalan Arkeologi Bawah Air di Perairan Pulau Sumatera*”. Edisi 13/Tahun XV/Juni 2009.
- SS, Rakhmad Bakti Santosa. *Pengawasan dalam rangka Perlindungan dan Pelestarian: Studi Kasus Situs Bawah Air Perairan Karang Heluputan Kepulauan Riau*, dalam <https://rahmadmarin.files.wordpress.com/2015/02/pengawasan-dalam-rangka-perlindungan-dan-pelestarian-studi-kasus-situs-bawah-air-perairan-karang-heluputan-kepulauan-riau.pdf>, diakses pada 24 Januari 2018.
- Setyawanta R, Tri, *Pengaturan Hukum Penanggulangan Pembajakan Dan Perompakan Laut Di Wilayah Perairan Indonesia*, *Media Hukum*/Vol.V/No1/Januari - Maret/ 2005 No ISSN 1411-3759.
- Tim Kerja Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Landas Kontinen Indonesia, 2012 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Takhta Suci (Vatikan), *Palang Merah Internasional & Organisasi Internasional Sebagai Subjek Hukum Internasional*. Dalam situs <http://www.negarahukum.com/hukum/takhta-suci-vatikan-palang-merah-internasional-organisasi-internasional-sebagai-subjek-hukum-internasional.html>, diakses pada 6 Desember 2017.

UNESCO Convention Law On Protection Of Cultural Heritage, dalam [http://www.unesco.org/culture/underwater/infokit\\_en/](http://www.unesco.org/culture/underwater/infokit_en/). diakses pada 25 Januari 2018

*Vatikan sebagai Subjek Hukum Internasional.* Dalam situs <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2347/vatikan-sebagai-subjek-hukum-internasional>, diakses pada 6 December 2017.

Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Menanti Kepastian Arah Pengelolaan BMKT, dalam <http://setkab.go.id/menanti-kepastian-arah-pengelolaan-bmkt/>, diakses pada tanggal 24 Januari 2018.

Susantio, Djulianto, Tingginya Nilai Komersial Kapal Kuno yang Tenggelam di Perairan Nusantara [https://www.kompasiana.com/djuliantosusantio/tingginya-nilai-komersial-kapal-kuno-yang-tenggelam-di-perairan-nusantara\\_58dc42005f23bd185e9770a2](https://www.kompasiana.com/djuliantosusantio/tingginya-nilai-komersial-kapal-kuno-yang-tenggelam-di-perairan-nusantara_58dc42005f23bd185e9770a2), diakses pada tanggal 24 Januari 2018.

<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditpcbm/2015/08/18/1456/>, diakses pada tanggal 26 Januari 2018.